



Banggar Nilai Pelaksanaan APBD DKI 2021 Kurang Baik

■ ZAINUR MAHSIR RAMADHAN

JAKARTA —Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Banggar DPRD) DKI Jakarta memberikan penilaian kurang baik terhadap kualitas pelaksanaan kegiatan anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sepanjang 2021. "Kualitas itu tampak dari rekomendasi yang diberikan lima Komisi di DPRD DKI Jakarta setelah mengevaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) tahun anggaran 2021," kata Wakil Ketua Banggar DPRD DKI, Misan Samsuri, di Jakarta, Senin (5/9).

Atas dasar itu, kata dia, Banggar DPRD DKI mendorong Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) konsisten menindaklanjuti setiap catatan yang disampaikan setiap komisi untuk perbaikan pelaksanaan APBD pada tahun berikutnya. Dia mengingatkan, perbaikan dilakukan khususnya terkait penyerapan anggaran sehingga bisa meminimalkan adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). "Dari beberapa Komisi, kebanyakan soal perencanaan kegiatan yang mestinya dibuat secara baik agar tidak terjadi SiLPA," ujar politikus Partai Demokrat tersebut.

Semua komisi di DPRD DKI memberikan catatan hasil evaluasi P2APBD tahun anggaran 2021 saat rapat Banggar bersama TAPD di Grand Cempaka Resort, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/9).

Komisi A dalam salah satu catatan, mengimbau agar Pemprov DKI segera menertibkan aset milik pemerintah daerah yang tidak digunakan. Sehingga aset yang ada tidak dimanfaatkan atau diserobot oleh pihak lain.

"Proses sertifikasi aset-aset lahan atau tanah milik Pemprov DKI agar dapat dipercepat dan didokumentasikan dalam bentuk digitalisasi agar mudah mengakses bila diperlukan," ujar Ketua Komisi Bidang Pemerintahan DPRD DKI, Mujiyono.

Komisi B, dalam salah satu catatannya mengimbau seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) melakukan perbaikan dalam mekanisme penyusunan perencanaan anggaran, dengan harapan penyerapan bisa lebih optimal.

Salah satunya, tulis Komisi Bidang Perekonomian itu, yaitu melakukan peninjauan ulang secara jelas terhadap target, hasil dan efek dari program serta kegiatan yang akan dilakukan pada tahun berikutnya. "Jika memang program dan kegiatan tersebut peluangnya kecil untuk dilaksanakan, lebih baik tidak diusulkan," kata Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail.

Selanjutnya, Komisi C yang membidangi masalah keuangan, dalam catatannya mendorong Pemprov DKI agar lebih realistis saat menetapkan target pendapatan retribusi daerah. Pasalnya, pada 2021, Pemprov DKI hanya mampu mendapatkan 50,79 persen atau Rp 383,8 miliar dari target yang dicanangkan sebesar Rp 755,7 miliar. "Dalam menetapkan target pendapatan retribusi daerah, ke depan harus lebih realistis, logis, wajar sesuai potensi yang nyata di lapangan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan," kata Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta Yusuf.

Komisi Bidang Pembangunan dalam salah satu catatannya mengimbau agar Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan

Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta lebih intens berkomunikasi dengan kelompok kerja (Pokja) sehingga meminimalisasi gagal lelang yang kerap terjadi. "Mohon menjadi catatan, BPPBJ maupun pokja tidak saling lempar tanggung jawab dalam proses pengadaan barang dan jasa. Sering terjadinya gagal lelang sehingga menghambat pengadaan barang serta program pembangunan bagi masyarakat luas," ujar Sekretaris Komisi D DPRD DKI Syarif.

Adapun, Komisi Bidang Kesejahteraan Rakyat, mendorong Dinas Kesehatan DKI untuk meningkatkan sarana dan prasarana di sejumlah rumah sakit yang kini dinamai dengan rumah sehat. Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, mengatakan, langkah itu harus diwujudkan agar masyarakat dapat terlayani secara optimal. "Misal keterbatasan lahan parkir di RSUD Johar Baru, masalah pengalihan aset untuk pembangunan gedung baru di RSUD Cempaka Putih, rencana pengembangan RSUD Tanah Abang dan masalah akses di RSUD Kemayoran," kata politikus PSI tersebut.

Sementara itu, Ketua TAPD Provinsi DKI, Marullah Matali, menyampaikan, pihaknya memastikan untuk mencermati seluruh catatan setiap komisi di DPRD DKI terhadap P2APBD DKI 2021, sebagai bahan evaluasi untuk penganggaran pada tahun berikutnya. "Setelah ini kami bahas dengan teman-teman di lingkup TAPD dan SKPD untuk membahas rekomendasi dari masing-masing komisi. Jadi ini kami cermati betul yang telah disampaikan," ujar sekda DKI tersebut. ■ antara ed: erik purnama putra